

AKUNTABILITAS APARATUR PEMERINTAH DALAM PROSES PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2004

Maryanto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: maryanto_adm@yahoo.co.id

Abstrak: Perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan akan tercapai apabila ditunjang dengan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel dan memiliki integritas, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tidak hanya sebatas seremonial saja, berharap dengan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya akan terimplemntasikan dengan baik. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer, dalam hal ini melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling dan analisis data dengan mereduksi, penyajian kemudian verifikasi. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo dalam proses pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, musrenbang kelurahan yang di laksanakan disetiap tahun menjadi wadah dalam menyerap isu-isu lingkungan di wilayah kelurahan Jatimulyo melalui musyawarah warga dari tingkat RT dan RW demi terwujudnya pembangunan yang merata baik fisik maupun non fisik, walaupun ada sedikit ketidakpuasan dari masyarakat berdasarkan dana hibah yang turun dalam implementasinya, namun pada prinsipnya masyarakat sangat memaklumi dengan adanya keterbatasan dana hibah dalam pelaksanaan amusrenbang.

Keyword: Akuntabilitas, Musrenbang, Undang-Undang No 25 Tahun 2004

Abstract: Planning the development of systematic, targeted, integrated, and responsive to change will be achieved if supported by the performance of government officials accountable and have integrity, so that the implementation of development planning is not merely ceremonial, hoping to accountability in the implementation process will be implementadwell, This research uses descriptive qualitative type of research, using data sekunderdan primary data, in this case through data collection techniques with in-depth interviews, observation and documentation, while the technique of determining the informant using snowball sampling technique dan analisisdenganmereduksi of data, presentation and then verifikasi. Results from this study musrenbang in to lurahanJatimulyo in the process of implementation has been performing well, directed, integrated and responsive to change, musrenbang villages carried on every year to absorb the container in environmental issues in the region through consultation Jatimulyo village residents from the level RT and RW for the realization of equitable development both physical and non-physical, although there was little dissatisfaction of community based grants are down in the implementation, but in principle the community know well the limitations in the implementation amusrenbang grants.

Keyword: Accountability, Musrenbang, Low of 25Number and year 2004

PENDAHULUAN

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2004 memberikan peluang baru dalam konteks pembangunan khususnya di tingkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Hal ini demi menunjang daya saing dalam menyongsong pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, agar semua masyarakat pada umumnya merasakan penyamarataan pembangunan sesuai visi-misi daerah yang bersangkutan.

Perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan menurut pasal 2 ayat 2 Ini akan tercapai apabila ditunjang dengan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel dan memiliki integritas, Sadana (2011). Disamping itu, keberhasilan atau kegagalan misi lembaga pemerintahan akan bisa di pertanggungjawabkan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan integritas sangat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah terutama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan akuntabilitas proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah pada umumnya akan mampu di pertanggungjawabkan dengan transparansi dihadapan publik, termasuk aspirasi publik yang sudah menjadi program prioritas pembangunan akan tersalurkan dalam bentuk implementasinya.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Pemerintah Desa/Kelurahan dengan diawali rapat RT/RW dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tentunya ini merupakan tolak ukur dalam penataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No.050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Transparansi yang menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan masih terkesan tertutup dan kurang transparan. Kenyataannya saat ini perencanaan pembangunan kurang maksimal dan masih belum maksimal, (Berita Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah 2009). Maka tidak heran jika Indonesia pada umumnya pembangunan belum merata di berbagai daerah.

Atas dasar berbagai permasalahan di atas, sehingga peneliti mengambil judul tentang” Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) di Lembaga Pemerintahan Kantor Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Musrenbang di Kantor Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? Dan bagaimana implementasi prinsip Musrenbang di Kantor Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan mendiskripsikan pelaksanaan Musrenbang dan implementasi prinsip.

Aparatur pemerintah merupakan pengemban tugas berat negara pada umumnya dan daerah pada khususnya dalam tata kelola segala urusan pelaksanaan program daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sekretariat wakilpresiden (2012) bahwa aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk terwujudnya visi misi pemerintah daerah tergantung dari manajemen sumber daya aparatur pemerintah yang bersangkutan, karena semua program daerah termasuk program Perencanaan Pembangunan Daerah tergantung dari akuntabilitas dan integritas aparat Kelurahan/Desa untuk aparatur Pemerintah paling bawah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 aparatur pemerintah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan (*mide bewine*), dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan jenis deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2009) dengan melalui sumber data primer dijelaskan oleh Marzuki (2002) dan melalui data skunder yang di jelaskan oleh Narimawati (2008) sementara dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagaimana yang di sampaikan Sutopo (2002) dan menggunakan observasi terus terang atau tersamar Sugiyono (2009) kemudian menggunakan analisis dokumen Sugiyono (2011), dalam teknik penentuan informan menggunakan snowball sampling Sugiyono (2011) dan teknik analisis menggunakan reduksi data Sugiyono (2011) penyajian data (Sugiyono 2009) verifikasi Sugiyono (2011) dengan keabsahan data menggunakan triangulasi Sugiyono (2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas aparat pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan musrenbang dan prosesnya pelaksanaannya, mulai dari awal pemberitahuan sampai dilaksanakannya penyusunan merupakan suatu bentuk akuntabilitas yang harus dimiliki oleh pihak kelurahan (panitia) yang dilakukan bersama-sama dengan pihak LPMK dalam membangun komunikasi untuk mengajak warga berpartisipasi dalam proses dan pelaksanaan musrenbang.

Waktu pelaksanaan musrenbang

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan para Informan di kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengenai waktu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatimulyo, bahwa pelaksanaan musrenbangkel di kelurahan Jatimulyo selalu dilaksanakan di setiap tahun, hal ini sesuai dengan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang pelaksanaan musrenbang di setiap daerah, bahwa setiap daerah harus menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo selalu dilaksanakan di awal tahun tepatnya di awal bulan januari atau pertengahan, hal ini sesuai intruksi dari pihak kecamatan yang berhak menentukan waktu dan tanggal pelaksanaannya, pihak kelurahan hanya menjalankan sesuai intruksi dari pihak kecamatan.

Adanya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatimulyo hal ini menandakan bahwa di setiap tahun usulan-usulan terkait pengajuan program dari warga dengan melalui RT RW selalu ada, sehingga pelaksanaan musrenbangkel selalu dilaksanakan oleh kelurahan di setiap awal tahun, tepatnya di bulan januari.

Kelurahan Jatimulyo dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 15 pertengahan bulan januari di awal tahun, namun untuk tanggal tidak setiap tahun akan sama dalam penetapannya akan tetapi bisa berbeda hal ini di buktikan dengan penetapan tanggal pelaksanaan musrenbang kelurahan Jatimulyo tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 28 ahir bulan januari di awal tahun.

Proses pelaksanaan musrenbang

Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatimulyo sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan di lokasi penelitian ini, bahwa pada awalnya proses pelaksanaan musrenbangkel akan dilakukan pemberitahuan dulu kepada RW, kemudian pihak RW akan menyampaikan pemberitahuan juga kepada pihak RT-RT yang ada di wilayahnya, dengan tujuan untuk segera melakukan rapat di tingkat RT dan RW.

Warga di tingkat RT dalam penyusunan program-program yang akan di bawa ke tingkat RW hal ini merupakan bagian dari demokrasi dalam musyawarah, warga di beri kesempatan bersuara,

mengusulkan hal-hal yang perlu di benahi terkait masalah pembangunan di wilayahnya, setelah proses rapat di tingkat RT dengan mengajukan program-program yang di sepakati maka kemudian akan di bawa ke tingkat RW yang akan di bahas lagi di tingkat RW, untuk di bawa ke tingkat kelurahan atau di kembalikan dengan melalui form yang di lampirkan di surat undangan oleh pihak kelurahan.

Program-program yang sudah berada di tulis dalam form pemberitahuan dari keluarahan akan di tinjak lanjuti oleh pihak kelurahan dengan memperhatikan usulan atau aspirasi warga dalam membenahan pembangunan yang akan di bawa di musrenbangkel melalui survey langsung ke lokasi yang di usulkan warga untuk memastikan keadaan yang sebenarnya, setelah itu pihak kelurahan akan mengadakan acara pra musrenbang yang mana dalam pra musrenbang ini akan di bahas kembali terkait program-program pembangunan yang akan di benahi dari semua RT RW, dan menetapkan patoan harga dalam pendanaan program yang sudah di survey dan perlu di dahulukan atau program prioritas.

Pelaksanaan musrenbangkel akan di laksanakan setelah berkisar satu minggu dari pelaksanaan pra musrenbang, semua hasil yang sudah di bahas dan di tetapkan di pra musrenbang akan di bawa ke musrenbangkel untuk di sampaikan dan di uraikan kembali oleh pak lurah dan semua pihak terkait, seperti LPMK yang bertanggungjawab dalam pengawasan proses pelaksanaan musrenbangkel juga akan di hadiri oleh semua RT, RW dan semua lembaga yang ada di kelurahan Jatimulyo.

Hasil dari pelaksanaan musrenbangkel akan di bawa ke tingkat kecamatan yang akan di wakili oleh salah satu warga kelurahan Jatimulyo yang sudah di tunjuk oleh pihak kelurahan untuk mewakili musrenbang kecamatan, tidak hanya sampai di kecamatan akan tetapi setelah di laksanakan di tingkat musrenbang Kota dan seterusnya.

Perwakilan warga yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang

Musrenbang kelurahan merupakan wahana publik dalam penyambung lidah aspirasi masyarakat untuk kesetaraan dan kesejahteraan warga dalam pembangunan, dalam proses pelaksanaan musrenabng ini tentunya tidak semua warga di libatkan dalam pelaksanaannya namun tentunya semua warga punya hak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu di ajukan untuk pembangunan yang perlu di benahi.

pembangunan fisik maupun non fisik, yang di ajukan oleh setiap warga akan di tindak lanjuti oleh pahak panitia yaitu pihak kelurahan dengan pihak pengawasan ialah LPMK. data hasil wawancara peneliti dengan di dapatkan dari informan di lokasi penelitian selama peneliti melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bahwa dalam pelaksanaan musrenbang tentunya ada banyak pihak yang datang menjadi wakil warga.

Perwakilan warga dalam pelaksanaan musrenbang ini akan di wakili oleh RT dan RW, dan di undang juga semua kelembagaan yang ada di kelurahan Jatimulyo, demi bersama-sama mengawasi mekanisme pelaksanaan musrenbang, seperti LPMK yang punya hak dalam pengawasan dan pengesahan setiap program yang akan direalisasikan, serta PKK, Karang werda, Karang taruna, Kelurahan siaga, PKM, dan juga Linmas, semua ini ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang dengan tujuan menguatkan program-program yang di ajukan untuk di ambil informasi lebih lanjut tentang penmbangunan yang akan di benahi terkait wilayahnya.

Akuntabilitas aparatur pemerintah

Proses pelaksanaan Musrenbang tidak lepas dari tanggungjawab kelurahan sebagai panitia dan fasilitator dalam perumusan kebijakan penetapan program yang akan di bawa ke tingkat kecamatan

dan tingkat kota, hal ini perlu adanya akuntabilitas tentunya dari pihak terkait seperti pihak kelurahan dan LPMK sebagai lembaga yang mengawasi proses perumusan kebijakan musrenbang kelurahan.

Akuntabilitas aparatur kelurahan dan LPMK akan sangat menentukan arah proses perumusan kebijakan musrenbang di kelurahan Jatimulyo dalam pelaksanaannya di lapangan, tentunya setiap aspirasi dan program-program warga melalui RT dan RW yang di ajukan akan utuh dan di terima dengan baik demi terselenggaranya pembangunan yang mengarah pada kebutuhan warga.

Dari hasil data wawancara peneliti terkait masalah akuntabilitas aparatur kelurahan dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan, bahwa akuntabilitas aparatur kelurahan sudah maksimal dengan sangat detail dan transparan dalam proses pelaksanaannya sehingga warga di berikan kesempatan penuh dalam menyampaikan hal-hal yang perlu di sampaikan dalam proses pelaksanaan musrenbang.

Hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa akuntabilitas aparatur kelurahan sudah bagus dalam pertanggungjawabannya, karna pada dasarnya pihak kelurahan hanya sebagian yang di libatkan menjadi panitia dalam pelaksanaan musrenbang, keterlibatan pihak kelurahan dalam pelaksanaan ini hanya untuk membantu menjadi fasilitator warga karena yang berperan penuh dalam pelaksanaan ini adalah warga langsung.

Dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan ini yang bertanggungjawab penuh adalah LPMK selaku pengawasan dan berjalan bersama dengan pihak kelurahan yang menjadi bagian di dalam kepengurusan LPMK, setiap tahun dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo sudah cukup bagus transparan, setiap hal-hal penting seperti adanya dana sudah disampaikan dengan transparan oleh pihak kelurahan dengan LPMK.

Di kelurahan Jatimulyo sampai saat ini belum ada masalah dalam prosesnya karna warga bias menjadi bagian dan berperan langsung didalamnya, pihak kelurahan hanya membantu dalam hal surat menyurat seperti pengajuan ke PU dan pemkot jika memang program tersebut perlu di ajukan langsung kesana.

Aspirasi warga dan hasil program musrenbang

Musrenbang kelurahan merupakan suatu wahana atau proses dalam perumusan kebijakan pembangunan oleh pemerintah kelurahan dengan melalui musyawarah atau rapat mulai dari tingkat RT dan RW yang memberikan kesempatan kepada warga dalam peran penting bersuara dalam segala hal pembangunan yang perlu di benahi di kelurahan Jatimulyo.

Suara atau aspirasi warga lewat musyawarah RT dan RW akan di ajukan dalam bentuk program pembenahan pembangunan yang akan di ajukan ke tingkat kelurahan dengan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan Jatimulyo, untuk menemukan kesepakatan program yang perlu di utamakan dan menjadi program prioritas kelurahan dalam pembangunan.

Dari wawancara peneliti dengan informan di lokasi penelitian bahwa setiap program yang di ajukan oleh warga melalui RT dan RW pada dasarnya akan di terima semua dan akan di bahas di tingkat musrenbang, namun ada yang memang perlu di dahulukan dan ada yang tidak perlu di benahi atau di realisasikan tahun itu, tergantung dari lokasi program yang akan di benahi melalui musrenbang, karna pihak kelurahan bersama pihak LPMK akan meninjau melakukan survey langsung ke lokasi yang di ajukan warga.

Setelah di lakukan survey maka dalam pelaksanaan pra musrenbang akan di bahas untuk pematangan menuju musrenbang, dengan memilih program prioritas yang memang perlu di utamakan, setiap program dana di batasi tidak lebih dari 50 juta sementara yang lebih dari 50 juta pendanaannya akan di ajukan langsung ke PU bahkan kalau skala provinsi akan di ajukan langsung ke tingkat provinsi.

Implementasi prinsip musrenbang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan daerah, bahwa pelaksanaan musrenbang di daerah harus terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, mekanisme proses pelaksanaan musrenbang di daerah tidak hanya sebatas momen seremonial saja akan tetapi harus di laksanakan sesuai prinsip musrenbang yang di perintahkan oleh pemkot, mulai dari awal pemberitahuan sampai akhir pelaksanaan musrenbang dengan perumusan hasil musrenbang yang akan di tindak lanjuti oleh musrenbang tingkat kecamatan.

Implementasi musrenbang di kelurahan Jatimulyo dalam pelaksanaannya sudah sesuai prosedur mekanisme musrenbang selama ini, mulai dari awal pemberitahuan sampai dilaksanakannya musrenbang tidak ada hal-hal yang menyimpang dalam prosesnya, pihak kelurahan dan LPMK selalu bersama dalam membangun komunikasi dengan warga untuk semua berpartisipasi dan berperan dalam penyusunan program pembangunan.

Pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo di mulai dari pemberitahuan pada tingkat RT dan RW, kemudian akan di laksanakan musyawarah warga di tingkat RT dan RW, setelah dari tingkat RT dan RW selesai dalam penyusunan program maka akan di bawa ke tingkat musrenbang kelurahan dengan melalui pra musrenbang sebelum musrenbang di laksanakan, sampai program yang di ajukan warga melalui RT dan RW akan di tetapkan di musrenbang dan menjadi hasil program prioritas musrenbangkel, hal ini merupakan imlementasi prinsip dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo.

Implementasi hasil musrenbang

Sebuah proses yang baik akan menghasilkan buah yang baik, begitu juga dengan proses pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Jatimulyo yang setiap tahun di laksanakan tepatnya di awal tahun setiap bulan januari, proses panjang dalam pelaksanaannya mulai dari pemberitahuan sampai pelaksanaan musrenbangkel merupakan wujud dari penataan lingkungan melalui pembenahan pembangunan

Hasil dari pelaksanaan musrenbang kelurahan tentunya akan di implementasikan di lapangan dengan melakukan pembenahan pembangunan di setiap lokasi yang di ajukan warga melalui program prioritas musrenbang, tentunya warga punya peran dalam mengawal dan berpartisipasi dalam pembangunan ini

Hasildari data wawancara di lokasi penelitian bahwa implementasi hasil musrenbang sudah berjalan lancar selama ini, hanya saja dengan keterbatasan dana yang ada membuat warga kurang puas dengan keterbatasan tersebut, karna dengan keterbatasan dana tersebut tidak semua program menjadi terlaksana tahun tersebut akan tetapi berdasarkan program yang paling penting dibenahi dan perlu di dahulukan

Rasa ketidak puasan warga bukan di implementasi hasil pembenahan pembangunan, akan tetapi lebih pada pendanaan yang sangat terbatas, namun pada prinsipnya semua warga memaklumi karena memang dana yang di pakai dalam pelaksanaan musrenbang ini hanya dana hibah, yang jumlahnya sangat kecil sebesar 500 juta dan harus di bagi kesetiap RT dan RW dalam pendanaan yang di ajukan melalui mekanisme musrenbangkel.

Terbatasnya dana yang ada tidak menjadi persoalan untuk tidak terealisasinya pembangunan yang sudah di tetapkan, warga bersama-sama berpartisipasi dalam pembenahan pembangunan dengan bekerja secara social dan gotong royong, pihak LPMK serta kelurahan dan tim teknis akan mengawasi proses implementasi hasil dari musrenbang.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip musrenbang pada dasarnya, momen musrenbang yang di laksanakan setiap tahun bukan hanya milik aparat pemerintah kelurahan akan tetapi yang sangat berperan adalah warga langsung,

Mekanisme penyusunan program sudah sesuai dengan undang-undang No 25 tahun 2004 bahwa setiap daerah harus melakukan penyusunan program perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun menengah berdasarkan program yang diajukan warga melalui RT dan RW di lihat dari skala pendanaannya.

Akuntabilitas pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo dalam proses pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, musrenbang kelurahan yang di laksanakan disetiap tahun menjadi wadah dalam menyerap isu-isu lingkungan di wilayah kelurahan Jatimulyo melalui musyawarah warga dari tingkat RT dan RW demi terwujudnya pembangunan yang merata baik fisik maupun non fisik, pihak kelurahan bersama LPMK yang paling punya tanggungjawab dalam proses pelaksanaan musrenbang kelurahan sudah transparan dalam proses pelaksanaan mulai dari awal sampai hasil musrenbang dan terimplementasi di lapangan,

Implentasi prinsip pelaksanaan musrenbang di kelurahan Jatimulyo sudah baik sesuai dengan asas-asas mekanisme penyusunan musrenbang kelurahan, mulai awal pemebritahuan pada warga melalui RT dan RW sampai penyusunan program yang akan di bawa ke kelurahan dalam pelaksanaan musrenbang, dengan melalaui form dari kelurahan dan di kembalikan lagi untuk pelaksanaan pra musrenbang dengan tujuan mematangkan program yang di ajukan warga.

Akuntabilitas pelaksanaan dalam proses penyusunan dan mekanisme perumusan kebijakan sudah di implementasikan dengan baik, maka hal tersebut perlu di pertahankan dan di tingkatkan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sektor pembangunan.

Keterbatasan dana dalam implementasi hasil musrenbang membuat warga sedikit kurang puas meskipun pada dasarnya warga memaklumi karna keterbatasan dana hibah yang di alirkan ke musrenbang, maka pihak kelurahan bersama pihak LPMK benar-benar mampu memilih dan memilah dalam menentukan untuk program yang benar-benar perlu di prioritaskan dan paling penting di dahulukan sehingga mampu meminimalisir anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar kebijakan publik, bandung, alfabeta
- Narimawati, umi , 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif, bandung, agungs media
- Sekretariat wakil Presiden RI, 2012, Menuju manajemen publik kelas dunia, jakarta, sekretariat wakil presiden RI,
- Sadhana, kridhawati. 2012, Etika birokrasi dalam pelayanan publik. Malang, Citra.
- Sugiono, 2011, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D, Bandung, Alfabeth,
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sutinah, 2006, metode penelitian sosial berbagai alternative pendekatan, Jakarta, Renada media group.
- Suharsimi, Arikuntu 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Jakarta, rineka cipta,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Bab VII Pasal 15

Jurnal, Ishardino, watries. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. Desember 2011,

Berita Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah. Musrenbang Dinilai Tidak Maksimal. 10 Desember 2009

<http://punyapolitik.wordpress.com/2012/12/17/perlunya-perbaikan-mekanisme-musrenbang>

<http://tasrifsalawa.blogspot.com/2012/12/makalah-formulasi-kebijakan.html>